

Prosiding Simposium Nasional  
Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008

# "100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perspektif"

Yogyakarta, 16 - 17 Mei 2008

Penyunting: M. Ridhah Taqwa, dkk.



Klaster:

EKONOMI dan POLITIK  
SOSIAL dan HUMANIORA

ISBN 979168188-0



9 789791 681889

Himpunan Mahasiswa Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada  
(HMP/IGM)

# PARTISIPASI GURU DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh  
Siti Irene Astuti D.  
Mahasiswa S3 Sosiologi UGM

## INTISARI

*"Teachers are born, not made" fails to take into account the wealth of knowledge we have about good teaching and how children learn". Teachers can supplement their pedagogical and practices by observing other good teachers"*

Guru sebagai salah satu komponen utama dalam pendidikan. Guru, siswa, dan kurikulum merupakan tiga komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan *conditio sine qua non* atau syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Guru memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing tetapi sebagai *'social agent hired by society to help facilitate members of society who attend'*, atau agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang akan datang dan sedang berada di bangku sekolah. Guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan komponen yang amat menentukan mutu pendidikan.

Guru dituntut responsif terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Salah satu program peningkatan guru adalah dengan diadakan sertifikasi guru. Dalam realitasnya program ini masih dinilai pro-kontra oleh guru. Kebijakan sertifikasi guru yang masih dalam proses masih harus ditata dalam tatanan makro dan mikro. Dalam penelitian ini terbukti bahwa sertifikasi guru masih dipahami sebagai "prasyarat legal" untuk dapat meraih keuntungan materi daripada peningkatan profesionalisme guru. Hal ini tercermin dari kajian terhadap tiga kasus di SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Depok dan SMP N 1 Ngablak. Sebagai kasus SMP N 4 Pakem guru

## PARTISIPASI GURU DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh  
Siti Irene Astuti D.  
Mahasiswa S3 Sosiologi UGM

### INTISARI

*"Teachers are born, not made" fails to take into account the wealth of knowledge we have about good teaching and how children learn". Teachers can supplement their pedagogical and practices by observing other good teachers"*

Guru sebagai salah satu komponen utama dalam pendidikan. Guru, siswa, dan kurikulum merupakan tiga komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan *conditio sine quanon* atau syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Guru memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing tetapi sebagai *'social agent hired by society to help facilitate members of society who attend'*, atau agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang akan datang dan sedang berada di bangku sekolah. Guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan komponen yang amat menentukan mutu pendidikan.

Guru dituntut responsif terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Salah satu program peningkatan guru adalah dengan diadakan sertifikasi guru. Dalam realitasnya program ini masih dinilai pro-kontra oleh guru. Kebijakan sertifikasi guru yang masih dalam proses masih harus ditata dalam tatanan makro dan mikro. Dalam penelitian ini terbukti bahwa sertifikasi guru masih dipahami sebagai "prasyarat legal" untuk dapat meraih keuntungan materi daripada peningkatan profesionalisme guru. Hal ini tercermin dari kajian terhadap tiga kasus di SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Depok dan SMP N 1 Ngaglik. Sebagai kasus SMP N 4 Pakem guru yang bersertifikasi relatif belum sampai 10 % tetapi sekolah ini

bersama gurunya selama 10 tahun terakhir mampu menunjukkan perbaikan mutu sekolah yang cukup signifikan dibandingkan dengan sekolah lainnya di DIY. Sementara jika dibandingkan dengan SMPN 1 Depok dan SMP N 1 Ngaglik jumlah guru yang sudah disertifikasi tak beda jumlahnya, tetapi ke dua sekolah selama 10 tahun perkembangan sekolah tidak secepat SMP N 4 Pakem. Dari studi ini dapat diasumsikan bahwa jumlah guru yang disertifikasi berkecenderungan tidak berkorelasi dengan mutu sekolah. Artinya masih ada faktor-faktor lainnya yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu sekolah. Lebih jauh, lagi dalam penelitian ini juga terbukti bahwa guru selalu berusaha untuk tetap responsif terhadap perubahan-perubahan sosial dengan berpartisipasi secara aktif dan kreatif untuk mengatasi berbagai gejala "dehumanisasi" dengan memberikan tindakan yang dapat membantu sekolah dalam upaya tuntutan perbaikan mutu pada satuan pendidikan.

**Kata kunci :** *Sertifikasi Guru, Mutu pendidikan*

## PENDAHULUAN

Pada tatanan makro, perubahan kebijakan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik, khususnya dalam masalah anggaran pendidikan, pemerataan, dan peningkatan mutu masih memerlukan solusi yang terpadu antar pemerintah, sekolah, dan *stakeholder*. Khususnya dalam perubahan kebijakan yang desentralistik diperlukan penguatan pada satuan pendidikan agar strategi pembangunan pendidikan di era otonomi dapat membantu upaya perbaikan mutu sekolah. Lebih lanjut lagi, dalam tatanan mikro yang terkait dengan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan komitmen bagi sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah yang otonom dan profesional. Lebih khusus lagi, guru perlu mengembangkan proses pembelajaran dengan mengembangkan metode belajar yang proaktif, kreatif, dan inovatif sebagai media untuk dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal.

Guru dalam jangka panjang akan mewarnai kualitas suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991.243 (45,96%) guru SD, SMP, dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Gambaran rinci secara kuantitatif keadaan kualifikasi minimal guru di atas sesuai jenjang persekolahannya sebagai berikut : Guru TK

yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 119.470 (78.1%), dengan sebagian besar 32.510 orang berijazah SLTA. Guru SD yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 391.507 (34%), yang meliputi sebanyak 378.740 orang berijazah SMA, dan sebanyak 12.767 orang berijazah D1. Di tingkat SMF jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 (71.2%), yang terdiri atas 130.753 orang berijazah D1 dan 82.788 orang berijazah D2. Adapun di tingkat SMA, terdapat 87.133 (46.6%) guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, yakni sebanyak 164 orang berijazah D1, 15.589 orang berijazah D2, dan 71.380 orang berijazah D3.

Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal akan semakin besar jika dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal yang terdapat pada PP RI No.1 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, yang intinya adalah seorang guru perlu memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal dan juga harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Artinya untuk menjadi guru tidak cukup dengan kualifikasi akademik tapi cukup terpenuhinya kompetensi.

Namun demikian, problem peningkatan kompetensi guru masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Hal ini terkait dengan upaya mencetak guru sama sulitnya membangun manusia yang berkarakter yang mampu mencetak profesi lain. Dalam konteks inilah, belajar adalah bagaimana memahami eksistensi guru dalam semua dimensinya, karena profesi guru adalah penggerak dinamik kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan isu tersebut penulis akan menfokuskan pada dua hal yang terkait dengan eksistensi guru terhadap perubahan kebijakan yakni masalah peningkatan kompetensi guru dan bentuk sumbangan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan studi pada tiga sekolah SMP N 4 Pakem, SMP N Depok dan SMP N 1 Ngaglik, Kabupaten Sleman DIY sebagai bagian dari studi tentang sekolah, partisipasi dan desentralisasi pendidikan.

## PEMBAHASAN

### Partisipasi Guru dalam Peningkatan Kompetensi

Sertifikasi guru menjadi isu yang menarik di sekolah karena setiap sekolah mulai mengidentifikasi guru-guru yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi guru. Pro-kontra terhadap kebijakan sertifikasi guru tidak mengurangi minat sekolah dan guru untuk

merespon kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikasi guru. Guru yang pro-sertifikasi adalah guru yang masih mempunyai kesempatan untuk berjuang mendapatkannya, sebaliknya guru yang "kontra" adalah guru yang tidak dapat mendaftarkan diri mendapatkan sertifikasi guru dikarenakan beberapa prasyarat administratif tidak mungkin dapat dipenuhi.

Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No 19/2005 tentang Standar Pendidikan Masal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogic, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, kompetensi guru pemula dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Table 1. Kompetensi Guru Indonesia ,2007

Kompetensi	Indikator
<p><u>Kepribadian</u> Merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan ber-akhlak mulia .</p>	<p>a. Bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai peserta didik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.</p> <p>b. Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.</p> <p>c. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.</p> <p>d. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.</p>

	<p>e. Bertindak sesuai dengan norma religius, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.</p>
<p><u>Pedagogik</u> Merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman pesera didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantive mencakup kemampuan pemahaman terhadap pesera didik , perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.</p>	<p>a. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta.</p> <p>b. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih .</p> <p>c. Menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil pembelajaran untuk perbaikan kualitas program secara umum</p> <p>e. Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi pesera didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.</p>
<p><u>Profesional</u> Merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang tsudi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.</p>	<p>a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulumn sekolah; memahami struktur konsep, metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait, dan menerapkan konsep konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan materi bidang studi.</p>

<p><u>Sosial</u> Berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,</p>	<p>a. Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik b. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan c. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/wali murid peserta didik.</p>
--	--

Sumber. Diknas, 2007

Partisipasi guru dalam program sertifikasi relatif masih sangat rendah, khususnya di SMPN 4 Pakem, SMPN 1 Depok dan SMPN 1 Ngaglik, sebagai gambarnya bahwa untuk tahun 2007 baru ada 1 guru SMPN 4 Pakem yang lolos 1 orang guru, SMPN 1 Depok yang lolos 5 guru, 3 guru yang belum mencukupi nilainya dan 2 guru sedang dalam proses. Realitas di lapangan bahwa sertifikasi disambut dengan "gegap gempita" tetapi di sisi lain sikap pasrah, pesimis, "gak ngoyo" adalah bagian dari sikap guru dalam menanggapi program sertifikasi yang sangat syarat dengan persyaratan administratif. Sebagaimana pengalaman yang bapak Pandi sebagai guru yang berprestasi diminta untuk mengajukan program sertifikasi karena ada tambahan quota untuk Kabupaten Sleman, tetapi karena permintaan tersebut baru diminta dan harus diselesaikan 2 hari untuk kelengkapan administratif, akhirnya permintaan untuk mengajukan program sertifikasi ditolak dikarenakan ketidaksanggupan untuk memenuhi persyaratan dalam waktu yang terlalu singkat.

Kasus di atas sebagai satu contoh bahwa dalam proyek sertifikasi perlu dikritisi dan dikaji oleh pemerintah khususnya dalam pemenuhan persyaratan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ita bahwa sertifikasi masih menimbulkan "dilemma", karena di satu sisi dapat mendorong peningkatan kualitas guru, dan di sisi lain menimbulkan kecemburuan antar guru. Lebih lanjut lagi, saat ini masih rendahnya partisipasi guru dalam program sertifikasi membuktikan bahwa sertifikasi bukanlah jaminan bagi sekolah untuk progresif melakukan perbaikan mutu sekolah sebagaimana realita yang terjadi di SMPN 4 Pakem yang saat ini baru memiliki seorang guru yang bersertifikat ternyata telah dapat melakukan berbagai perubahan-perubahan dalam perbaikan mutu sekolah. Artinya: ukuran kualitas guru tidak semata-mata ditentukan oleh sertifikasi yang sudah dimilikinya, tetapi kualitas pribadi. Berharap dan pasrah bahwa dengan mendapatkan sertifikasi guru akan

memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, tetapi bagi guru yang tidak ada kesempatan mendapatkan sertifikasi guru diharapkan tetap bersemangat dalam mengajar, demikian halnya harapan beberapa guru menyikapi program sertifikasi guru.

Kendala yang umumnya dialami oleh guru dalam mendapatkan sertifikasi antara lain adalah :

1. Umur tidak memenuhi prasyarat
2. Tidak siap lengkap persyaratan administrasi
3. Tidak cukup dengan persyaratan minimal
4. Tingkat pendidikan yang tidak mungkin ditingkatkan lagi

Kendala di atas sesungguhnya terkait dengan kebiasaan "budaya administratif" yang cenderung tidak dimiliki oleh semua guru. Ada kecenderungan bahwa guru tidak senang dan kurang tertib untuk menyimpan berkas-berkas administrasi yang terkait untuk urusan kenaikan pangkat, dan sebaliknya ada guru yang sangat teliti dengan berkas-berkas penting urusan kantor yang disimpan dalam file surat secara tertib. Perbedaan inilah yang kadang menjadi penghalang guru untuk pengajuan kenaikan jabatan di kantor. Ada kecenderungan bahwa tidak semua guru yang "malas" dengan urusan administrasi adalah guru yang tidak efektif dalam mengajar. Artinya, ada guru yang benar-benar bekerja sebagai "pendidik", tanpa diributkan dengan persyaratan administratif sebagai tuntutan dalam manajemen pendidikan yang lebih profesional. Oleh karena itu, dalam konteks yang berbeda bahwa sertifikasi membutuhkan perubahan manajerial pada satuan pendidikan khususnya dalam penyimpanan data-base semua aktivitas sekolah, termasuk guru-siswa lebih tertib dan teratur. Sehingga dalam perubahan kebijakan pendidikan bisa berjalan lebih koordinatif, tidak hanya sebagai kebijakan yang parsial saja.

Lebih khusus lagi, program sertifikasi yang sedang disosialisasikan dan diterapkan dalam upaya pembangunan pendidikan perlu dievaluasi dan dimonitoring efektivitasnya, sehingga guru sebagai subyek perubahan kualitas pendidikan benar-benar ditempatkan secara fungsional dalam proses perubahan kebijakan, dan bukan menjadi sumber konflik bagi penerapan kebijakan di bidang standar pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Chapman dan Mahlck<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa kegaga-

<sup>1</sup>Chapman dalam Suyata (2004). *Decentralized Basic Education Project Package; District Capacity*, Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama

lan kebijakan pendidikan dari pusat masuk dan dilaksanakan di sekolah dikarenakan bahwa :

1. Kebijakan pusat tak dikomunikasikan ke sekolah; para kepala sekolah dan guru tak mengerti bahwa mereka harus mengerjakan hal yang berbeda dengan sebelumnya.
2. Kebijakan yang telah dikomunikasikan ke sekolah tetapi dalam ungkapan-ungkapan yang tak jelas sehingga tak tahu apa yang harus mereka lakukan.
3. Tak jarang kepala sekolah dan guru beranggapan bahwa kebijakan dan program-program itu tak cocok dengan realitas sekolah dan kelas.
4. Para guru dan personal tak siap mengerjakan kebijakan dan praktiknya.
5. Cara-cara dan dukungan untuk menerapkan kebijakan tak mencukupi.
6. Informasi sekolah yang tersedia di departemen tak mencantumkan informasi praktek pedagogis di tingkat kelas.
7. Seringkali terjadi interaksi praktik yang positif dan negatif.

Dengan mencermati pendapat di atas, ada keinginan yang kuat dari guru di SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Depok dan SMP N 1 Ngaglik bahwa agar program sertifikasi guru dapat berjalan sesuai dengan tujuan diperlukan :

- a. Sosialisasi program lebih efektif dan intensif
- b. Pendampingan terhadap program dilakukan secara berkelanjutan
- c. Penambahan kesempatan untuk pengembangan karier diprioritaskan
- d. Manajemen waktu diterapkan lebih profesional
- e. Persyaratan administratif disederhanakan
- f. Penerapan azas keadilan dan kejujuran ditingkatkan

Di samping itu, bagi guru-guru yang secara administratif sangat sulit untuk mengajukan program sertifikasi diperlukan pendekatan-pendekatan personal dan partisipasi edukatif untuk menjaga semangat kerja dan kinerja di sekolah untuk terlibat dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan bukan sebaliknya sebagai sumber masalah di sekolah.

#### Partisipasi Guru dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia, seperti ditunjukkan dalam berbagai survei internasional-misalnya TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia-tidak lepas dari rendahnya mutu guru. Alasannya, guru mempunyai peran amat penting dan strategi

dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak artikel yang ditulis terkait dengan rendahnya mutu guru, kurang minatnya kaum muda berkualitas menjadi guru, salah satunya disebabkan oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material pada era globalisasi<sup>2</sup>

Di tengah keprihatinan terhadap kemerosotan mutu dan status guru, rancangan Undang-undang Guru diluncurkan dengan itikad baik, mengatur dan memberi jaminan terhadap kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Berbagai tanggapan atas RUU dan Kode etik Guru merupakan indikasi positif kepedulian masyarakat atas berbagai persoalan yang terkait dengan profesi guru dan pendidikan. Namun demikian persoalan fundamental sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan.

Pendidikan seharusnya menghormati dan menghargai martabat manusia berikut segala hak dasarnya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiannya sebagai subyek melalui proses pendidikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak contoh menunjukkan peserta didik diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis. Sebagai pendidik, guru tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi karena guru sendiri merasa terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional.

Gejala dalam masyarakat antara lain : 1). Dengan gaji dan tunjangan amat tidak memadai, membuat guru terlalu sibuk mencari penghasilan tambahan, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik terabaikan, tidak dilakukan sepenuh hati, 2) terseret mencari penghasilan tambahan, sebagaimana guru melanggar etika sebagai pendidik dengan memberi les privat bagi peserta didik, bahkan membocorkan soal-solanya sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberi komisi, memuaskan, atau terlibat aksi tutup mulut atas tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah, 3) Dengan jam mengajar panjang dan tugas administratif yang membebani, guru tidak punya waktu lagi untuk membaca dan mengembangkan diri. Pengetahuan dan kreativitas guru sulit berkembang. Akibatnya, peserta didik mau bertahan di depan guru di dalam kelas karena memang harus bertahan sebelum bel berbunyi dan menyelesaikan satu jenjang mendapatkan ijazah, 4). Keempat dengan berbagai kepelecehan dan kegetiran hidup sebagai obyek dalam

<sup>2</sup>Anita Lie (2005). *Guru Sebagai Pekerja Budaya*, Kompas 03-05-2005



sistem pendidikan nasional, sebagian guru belum mampu mengembangkan mekanisme untuk mengelola emosi negatifnya sehingga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri atau memperlakukan peserta didik dengan kasar<sup>3</sup>.

Dalam penelitian problem dalam mendidik anak dapat dideskripsikan sebagai berikut :

**Tabel 2. Problem Dalam Mendidik Siswa ,2007**

Realitas Obyektif Masalah	Realitas Subyektif Masalah Siswa		
	SMP N 4 Pakem	SMP N 1 Depok	SMP N 1 Ngaglik
Masalah Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kadang malas dan bandel disuruh belajar</li> <li>Tidak mau dipaksa belajar di rumah karena capek</li> <li>Tidak bisa bagi waktu antara belajar dan bermain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malas mengerjakan PR dan belajar</li> <li>Tidak bisa membagi waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulit disuruh belajar, jika sudah nonton TV</li> <li>Sulit dinasehati</li> <li>Sulit untuk memotivasi belajar</li> </ul>
Masalah Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak bisa terlibat karena keterbatasan pengetahuan orangtua</li> <li>Terbatasnya pengetahuan Bahasa Inggris orangtua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bisa terlibat karena keterbatasan pengetahuan dan waktu orangtua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak bisa terlibat dalam belajar karena keterbatasan pengetahuan orangtua</li> </ul>
Masalah Keterbatasan Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya sarana-prasarana di rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya sarana-prasarana di rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya sarana-prasarana belajar di rumah</li> </ul>
Masalah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anak masih senang nonton TV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan sekolah banyak tempat main <i>Play - station</i></li> <li>Lingkungan rumah cukup padat kurang kondusif untuk belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pergaulan semakin bebas</li> <li>Senang nonton TV dan main <i>play station</i></li> <li>Main HP</li> </ul>

Sumber : diolah dari data primer, 2007

<sup>3</sup> Ibid. halaman 2

berdasarkan matriks di atas, dapat diasumsikan bahwa semua sekolah menghadapi berbagai persoalan dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan. Dalam konteks inilah, setiap guru dituntut untuk dapat membantu mengatasi berbagai persoalan di atas yang membutuhkan kemampuan personal, sosial dan profesional guru. Namun demikian, dalam realitasnya guru masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik. Dalam penelitian ini, berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

Sumber Masalah	Deskripsi masalah
Keterbatasan Kepemilikan Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dapat berlangganan media massa: koran-internet</li> <li>Tidak punya buku referensi, dll.</li> </ul>
Keterbatasan Pengetahuan Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memotivasi siswa untuk belajar dan berprestasi</li> <li>Mengembangkan metode mengajar yang kreatif dan efektif,</li> </ul>
Problem Personal Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang sabar</li> <li>Kurang "telaten"</li> <li>Kurang tegas menghadapi siswa.</li> </ul>
Problem Personal Siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minat belajar rendah</li> <li>Nilai mata pelajaran rendah</li> <li>Kesadaran disiplin belajar rendah</li> <li>Senang nonton TV daripada belajar.</li> <li>Moralitas rendah, daya saing siswa rendah</li> </ul>

Sumber : diolah dari data primer, 2007

Berdasarkan masalah di atas, dapat diklasifikasikan ke dua sumber masalah pokok, yakni masalah yang bersumber dari dalam diri guru dan masalah yang berasal dari luar guru. Masalah yang berasal dari dalam guru terkait dengan keterbatasan yang dimiliki oleh guru, baik secara finansial maupun pengetahuan. Sedangkan



masalah yang bersumber dari luar sekolah berhubungan dengan latar belakang orangtua siswa.

Namun demikian, setiap guru berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu proses mengajar di sekolah, dengan berbagai cara. Guru berusaha untuk mengatasi keterbatasan kemampuannya secara bertahap, misalnya dengan mengembangkan ketrampilan komputer. Buku-buku yang diperlukan diusahakan oleh sekolah secara bertahap. Sedangkan persoalan yang berasal dari siswa diatasi dengan kesabaran, ketelatenan dan dikomunikasikan dengan orangtua siswa.

Lebih lanjut lagi, dalam menghadapi gejala dehumanisasi pendidikan, guru-guru di SMPN 4 Pakem, SMPN 1 Depok dan SMPN 1 Ngaglik sebagian besar berusaha untuk melibatkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu sekolah, baik yang secara langsung berpengaruh dalam proses belajar mengajar maupun secara tidak langsung untuk mengkondisikan perbaikan proses belajar. Dari berbagai jawaban yang diutarakan oleh guru-guru dikelompokkan sebagai berikut :

Aspek Yang Dikembangkan	Bentuk Aktivitas
Menjalin Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orangtua dan warga masyarakat</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pendidikan</li> <li>▪ Memberdayakan komite sekolah</li> </ul>
Mengembangkan Kemampuan Personaliti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membiasakan tertib waktu bekerja</li> <li>▪ Membudayakan disiplin</li> <li>▪ Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi</li> <li>▪ Mau bekerja keras dan ikhlas</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan memotivasi belajar siswa.</li> <li>▪ Mengembangkan kemampuan siswa secara akademik dan non-akademik</li> <li>▪ Memahami potensi, bakat dan minat siswa</li> <li>▪ Membantu mengatasi masalah siswa</li> </ul>
Meningkatkan Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengajar sesuai dengan standar kurikulum</li> <li>▪ Mengikuti diklat</li> <li>▪ Melanjutkan studi S2 /S3</li> <li>▪ Menambah jam pelajaran jika diperlukan</li> <li>▪ Meningkatkan manajemen mutu</li> <li>▪ Menghasilkan output yang berkualitas</li> <li>▪ Memberikan layanan khusus pada siswa</li> </ul>

Sumber: diolah dari data primer,2007

dalam keterbatasan dan kompleksitas masalahnya tetap berusaha untuk dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Guru tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan "kehidupan bangsa" ini dengan semangatnya.

## KESIMPULAN

Paparan di atas baru terbatas pada kajian tatanan mikro masalah pendidikan pada satuan pendidikan. Namun demikian, jika persoalan pendidikan pada satuan pendidikan tidak diatasi secara sungguh-sungguh maka menjadi sumber masalah pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, upaya pemerintah untuk memberikan perhatian yang "lebih" pada eksistensi guru dengan program sertifikasi yang terus "bergulir" dengan dinamikanya harus dibarengi dengan perbaikan dalam proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan yang tidak hanya ditentukan oleh "labelling" jumlah guru yang disertifikasi saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek-aspek budaya sekolah.

Persoalan mutu sekolah menjadi tanggung jawab semua warga. Dalam hal ini guru di sekolah mempunyai peran strategis sebagai "penggerak" perbaikan mutu pada satuan pendidikan yang dituntut memiliki kemampuan personal, sosial dan profesional. Keberhasilan guru dalam mengatasi masalah anak memberikan kontribusi bagi peningkatan prestasi sekolah. Guru dalam dinamika perubahan kebijakan diharapkan mampu mengatasi dua masalah yakni tuntutan internal dalam diri guru yakni untuk selalu responsif terhadap tuntutan kemampuan profesional, dan kedua tuntutan eksternal yakni harus dapat mengatasi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial yang menuntut guru untuk beradaptasi dalam mengatasi masalah yang proses belajar-mengajar di sekolah agar proses belajar-mengajar tetap berjalan secara efektif. Dalam konteks inilah, keberhasilan kebijakan pendidikan yang desentralistik sangat ditentukan oleh partisipasi guru dalam satuan pendidikan dan tentunya partisipasi masyarakat dalam tatanan komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Lie (2005). *Guru Sebagai Pekerja Budaya*, Kompas 03-05-2005
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2007). *Partisipasi dan Desentralisasi Pendidikan, Hibah*, 2007
- Makmuri dkk (2003). *Demokratisasi Dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta:LIPI
- Soeyanto (2001), *Infeksibiliast Otonomi Pendidikan*, KOMPAS.19 Agustus 20001
- Suyata (2004). *Decentralized Basic Education Peoject Package ; District Capacity* , Jakarta: Depatermen Pendidikan Nasional , Direktorat Pendidikan Lanjuatan Pertama
- Tilaar, HAR (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang : Indosesia Terra
- Tuti B (2005), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan : Kendala dan Peluang Masyarakat Miskin Untuk Meraih Pendidikan Yang layak di Era Otonomi Daerah*, Pasca UGM